

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kualitas kinerja Aparatur Pemerintah merupakan tolak ukur keberhasilan dan kemajuan penerapan sistem suatu wilayah. Pemberdayaan masyarakat menjadi objektivitas kerja yang utama untuk dapat mengukur pencapaian kinerja pemerintah dalam melakukan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta taraf hidup masyarakat yang lebih baik, memandirikan masyarakat agar lebih sejahtera dan terlepas dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Oleh karena itu perlu adanya tindakan pemerintah pusat dan daerah dalam membantu kepala desa sebagai pemerintahan terkecil yang menjalankan dan tolak ukur penerapan seluruh sistem dalam pemerintahan.

1. Sistematisa pengambilan keputusan Kepala Desa di Tapanuli Utara masih belum berkualitas, dan hal ini tergolong problema yang masih tetap menjadi permasalahan, walaupun dapan dikatakan tingkat pembangunan di sebahagian wilayah Tapanuli Utara semakin meningkat. Namun masih ditemukan permasalahan yang belum ditemukan solusinya seperti:

a. Banyaknya program kepala desa tidak terlaksana atau belum secara keseluruhan diterapkan, seperti pengambilan keputusan melalui MUSRENBANG, dikarenakan kesulitan dalam mengkoordinir keseluruhan masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, mengingat jumlah Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan didesa relatif masih rendah, Kemampuan dan keterampilan lembaga kemasyarakatan belum merata,

- b. Jumlah SDM perangkat desa yang kurang, dan minimnya aparatur desa yang ahli/kompeten dibidangnya dalam pengambilan keputusan.
- c. Minimnya pelaksanaan dan penerimaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjembatani kepentingan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dengan kepentingan masyarakat, serta mendapatkan komitmen/kesepakatan para pemangku kepentingan untuk penyempurnaan
- d. Belum optimalnya peran aktif atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik desa untuk mengelola dan mengatur pelaksanaan MUSRENBANG, dan juga peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam ikut serta pengambilan keputusan pengelolaan pembangunan desa, karena kurang efektifnya pelaksanaan fungsi lembaga pemerintah desa dan lembaga masyarakat (seperti ; BPD, LPMD atau sebutan lain, PKK dan Lembaga lainnya dalam menggerakkan partisipasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan).
- e. Hasil pelatihan aparatur desa belum optimal untuk mengembangkan memandirikan, menswadayakan aparatur desa dan masyarakat, ditemukanya dari banyaknya wilayah desa di Tapanuli Utara yang tergolong berkembang dikarenakan kualitas kepala desa dalam memimpin pengelolaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa.
- f. Belum ditemukannya solusi Tindakan dalam mewujudkan Kemampuan dan keterampilan pengurus lembaga kemasyarakatan belum merata pada seluruh anggota pengurus.

2. Peran pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara Khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tapanuli Utara dalam Melaksanakan Program Peningkatan kinerja seluruh aparatur desa di Tapanuli Utara, melalui :

- a. Penerapan program dan kebijakan BPMPD untuk diterapkan di seluruh desa Tapanuli Utara, untuk membantu kinerja kepala desa dalam menghadapi persoalan diwilayahnya seperti menerapkan pembinaan dan pelatihan bagi seluruh aparatur desa di Tapanuli Utara, membangun lembaga desa, dlsb.
- b. Evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini dilakukan untuk mengukur realisasi capaian agar sesuai dengan harapan
- c. Analisis Kinerja dan Pelayanan BPMPD, hal ini dilakukan sebagai upaya perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelatihan terhadap seluruh aparatur desa sesuai dengan lingkup bidang dan tugasnya, selanjutnya sebagai pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah.
- d. Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPMPD, penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tapanuli Utara ini diarahkan untuk mendapatkan kinerja yang akurat dan konsisten mengenai capaian kinerja dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya, manfaat, efisiensi, keekonomian dan efektifitas serta tercapainya tujuan program.

- e. Terbatasnya kemampuan APBD Kabupaten Tapanuli Utara dalam menyediakan anggaran untuk mendukung program-program yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tapanuli Utara.
- f. Kurangnya alokasi dana untuk melakukan monitoring langsung dengan wilayah yang luas di Tapanuli Utara
- g. Minimnya kuantitas dan kualitas aparatur pemerintahan daerah untuk melakukan pengawasan langsung keseluruhan desa maupun desa tertinggal dan terisolir di Tapanuli Utara
- h. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah maupun pemerintahan desa yang belum optimal dan ruang perkantoran yang kurang memadai, padahal manfaat besar untuk menunjang kinerja dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sejalan dengan usia alat/barang, maka kualitasnya pun semakin menurun sehingga banyak dibutuhkan penggantian/pemeliharaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang didapatkan dari analisis peneliti terhadap kinerja BPMPD Tapanuli Utara untuk meningkatkan kinerja aparatur desa, maka ada beberapa pokok pikiran yang bisa menjadi pertimbangan dalam membentuk hubungan kerjasama antara BPMPD Tapanuli Utara dengan kepala desa. Pokok-pokok pikiran berikut merupakan saran yang muncul dari kepedulian peneliti, untuk memberikan saran perspektif yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan di Tapanuli Utara, diantaranya :

1. Dalam mengkoordinir keseluruhan masyarakat dan seluruh perangkat desa, dapat dioptimalkan dengan melakukan kerjasama dengan lembaga lembaga desa lainnya, seperti lembaga adat untuk membantu pemerintah desa dalam mengkoordinir masyarakat untuk pengambilan keputusan seperti melalui MUSRENBANG
2. Perlu dilakukan lagi perekrutan ketenagakerjaan aparatur desa yang profesional di bidangnya di keseluruhan Tapanuli Utara semaksimal mungkin, agar dapat membantu kinerja Kepala Desa dalam pengambilan keputusan, dan pengawasan pembangunan di desa.
3. Perlu dilakukan lagi pengadaan kualitas sarana dan prasarana desa yang dimasimumkan untuk kelancaran aktivitas kinerja aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan seperti : sarana perkantoran dan sarana administratif lainnya.
4. Melakukan penyaringan atau diwujudkannya persyaratan untuk mengangkat pencalonan kepala desa, sebagai langkah awal untuk mewujudkan kepala desa yang profesional. Artinya melakukan pertimbangan yang tepat untuk memilih kepala desa yang memiliki kategori profesional, kreatif, memiliki kemampuan dalam melakukan kapasitas tupoksinya, hal tersebut kemungkinan akan membantu kinerja pemerintah daerah secara tidak langsung.
5. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang panjang, perlu adanya kerjasama yang efisien antara lingkup pemerintahan daerah dan desa

melakukan pertemuan atau bimbingan rutin hingga aparaturnya benar-benar paham dan mengerti dengan tujuan program.

6. Perlu ditingkatkan lagi oleh pemerintah daerah dan desa konsepsi misi kerja yang mengutamakan Keuletan, ketelitian, keseriusan dan kesabaran serta keprofesionalan adalah bagian dari faktor keberhasilan dalam proses program pemberdayaan masyarakat
7. Kegiatan monitoring pemerintah daerah terhadap kinerja aparaturnya sebagai kunci evaluasi pencapaian utama kemajuan di Indonesia, artinya hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah daerah menjadi hal peranjakan dari pemerintah pusat untuk melakukan survey keberhasilan di Indonesia
8. Peran pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara Khususnya Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Tapanuli Utara dalam Melaksanakan Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan di Tapanuli Utara perlu dioptimalkan lagi, baik itu dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, Anggaran dan Pembiayaan Program yang masih minim, Sarana dan Prasarana Pemerintahan yang kurang mendukung, serta Partisipasi Masyarakat yang cenderung masih rendah.